

KLIPING BERITA

RABU, 23 MARET 2022



KLIPING BERITA



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Singgalang

Kemenag Pd. Panjang Gelar Rakor Penyelenggaraan Zakat

Pd. Panjang, Singgalang

Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang melalui Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Zakat, Selasa (22/3) di aula kemenag setempat. Rakor yang dibuka Kakankemenag H. Alizar Chan itu diikuti unsur pimpinan baznas, kepala KUA, penyuluh agama Islam, pengurus LazisMu dan unsur lainnya.

Kakankemenag Alizar dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggara zakat itu dilaksanakan untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan zakat sesuai syariat dan regulasi perundang-undangan. Selain itu juga untuk mengevaluasi pengelolaan zakat yang telah dijalankan pimpinan dan staf baznas.

"Memberikan kesejahteraan masyarakat merupakan amanah Undang-undang Dasar 1945 dan itu terkandung dalam pengelolaan zakat. Zakat bisa bermakna bersih dan tumbuh,



SAMBUTAN- Kakankemenag Kota Padang Panjang H. Alizar Chan memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Zakat, Selasa (22/3) di aula kemenag setempat. (Jasriman)

bermakna bersih untuk Muzaqqi (pemberi zakat) serta bermakna tumbuh untuk Mustahiq (penerima zakat)," ujarnya.

Kedepannya, lanjut Alizar, tujuan zakat adalah untuk membangun negeri yang ujungnya adalah memberikan kesejahteraan. Dan Kemenag Padang Panjang siap bersama-sama membantu dan mengawasi Baznas Kota Padang Panjang untuk

mewujudkan Kota Padang Panjang yang berramah dan berrmartabat.

Ketua Baznas Syamsuarni yang hadir bersama Wakil Ketua IV H. Jasriman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggara Zakat Tahun 2022 ini dilaksanakan sebagai bentuk Kolaborasi semua pihak dalam pengelolaan dan penye-

lenggaraan zakat.

"Secara umum penyelenggaraan zakat telah dipaparkan oleh Kakankemenag, sedangkan kami dari Baznas akan mengulas secara teknis. Namun yang pasti baznas sudah mengelola zakat sesuai aturan syariat dan perundang-undangan," sebutnya. Sebagai salah satu bukti bahwa baznas sudah mengelola zakat sesuai aturan syariat dan perundang-undangan, hasil audit laporan keuangan untuk tahun 2021 lalu memperoleh opini WTP. "Ini merupakan WTP yang kelima kalinya secara berturut-turut," ujarnya.

Dalam sesi diskusi yang dipandu Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Basri, sejumlah pertanyaan dan masukan disampaikan peserta rakor kepada pimpinan baznas, baik yang berkaitan dengan pengumpulan maupun distribusi. Diantara usulan adalah meminta pimpinan baznas melibatkan penyuluh dalam pengelolaan zakat, terutama pembinaan mustahiq. (205)

Baznas Padang Panjang Bantu Modal Usaha 117 Mustahiq

PADANG PANJANG - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang menyalurkan zakat program Padang Panjang Makmur bagi para mustahiq yang ada di Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) di aula kantor camat setempat, Selasa (22/3).

Sebanyak 117 orang mustahiq yang memiliki usaha, menerima zakat berupa barang/peralatan untuk usaha yang sudah mereka jalankan, dengan total zakat sebesar Rp 209.700.000. Sebelumnya Baznas menerima 325 proposal, setelah melewati verifikasi data dan tinjauan lapangan, lolos sebanyak 117 orang untuk menerima zakat ini.

Wakil Ketua IV Baznas, H. Jasriman, S.Ag mengatakan, zakat yang disalurkan saat ini memang khusus untuk masyarakat yang sudah memiliki usaha. Dengan membantu keperluan dalam berusaha, sesuai dengan apa yang diminta saat mengajukan proposal.

"Zakat yang kita salurkan ini, tidak berupa uang tunai. Namun berupa barang untuk mereka melanjutkan usahanya. Kita membantu mereka membeli apa saja keperluan mereka untuk berusaha. Kita memaksimalkan zakat yang diterima bisa menjadi barang untuk usaha mereka," ujarnya.

Dengan didampingi pimpinan baznas dan OPD terkait, Camat PPT, Asrul memberikan secara simbolis kepada salah seorang penerima zakat berupa mesin kompresor yang bisa digunakan untuk usaha perbengkelan. Asrul berharap, bantuan yang sudah diterima ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk berusaha. Ini merupakan berdasarkan dari apa yang sudah diajukan melalui proposal. Ikut hadir Sekretaris Dinas Sosial PPKBPPPA H. Eri, Bagian Kesra Setdako, sejumlah OPD terkait, jajaran Baznas serta undangan lainnya. (205)



ZAKAT- Camat PPT Asrul didampingi pimpinan Baznas Kota Padang Panjang dan OPD terkait menyerahkan zakat program Padang Panjang Makmur secara simbolis, Selasa (22/3) di aula kantor camat PPT. (Kominfo)



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Posmetro Padang



PIMPIN RAPAT— Sekdako Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, memimpin rapat di Aula Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA). Rapat juga dihadiri Ketua TP-PKK, dr. Dian Puspita Fadly, Sp.JP, Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, MM dan pejabat terkait lainnya.

Zakat Padangpanjang Makmur Disalurkan Baznas di PPT

PDG.PANJANG, METRO
Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Padang Panjang menyalurkan zakat program Padang Panjang Makmur untuk mustahik yang ada di Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) di Aula Kantor Camat PPT, Selasa (22/3).

Sebanyak 117 orang mustahik yang memiliki usaha, menerima zakat berupa barang untuk usaha yang sudah mereka jalankan. Dengan total zakat sebesar Rp 209.700.000. Sebelumnya Baznas menerima 325 proposal, setelah melewati verifikasi data dan tinjauan lapangan, lolos sebanyak 117 orang untuk menerima zakat ini.

Wakil Ketua V Baznas, H. Jasriman, S.Ag mengatakan, zakat yang disalurkan saat ini memang khusus untuk masyarakat yang sudah memiliki usaha. Dengan membantu keperluan dalam berusaha, sesuai dengan apa yang diminta saat mengajukan proposal.

"Zakat yang kita salurkan ini, tidak berupa uang tunai. Namun berupa barang untuk

mereka melanjutkan usahanya. Kita membantu mereka membeli apa saja keperluan mereka untuk berusaha. Kita memaksimalkan zakat yang diterima bisa menjadi barang untuk usaha mereka," ujarnya.

Camat PPT, Drs. Asrul memberikan secara simbolis kepada penerima zakat berupa mesin kompresor yang bisa digunakan untuk di bengkel.

Asrul mengatakan, bantuan yang sudah diterima ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk berusaha. Ini merupakan berdasar dari apa yang sudah diajukan melalui proposal.

"Kita berharap bantuan ini bisa dipergunakan dengan maksimal, dan bisa membantu bapak ibu semua dalam menjalankan usaha. Kami Pemerintah Kota Padang Panjang sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Semoga ini tepat sasaran dan bermanfaat," tutur Asrul. Ikut hadir sekretaris Dinas Sosial PPKBPPPA, Bagian Kesra Setdako, jajaran Baznas serta undangan lainnya. (rmd)

Pemko Siapkan Langkah Percepatan Penurunan Stunting

PDG. PANJANG, METRO
Pemko Padangpanjang menyiapkan sejumlah langkah percepatan penurunan stunting. Ini sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKK-

BN). Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekdako Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, kemarin, di Aula Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA). Rapat juga dihadiri Ketua TP-PKK, dr. Dian Puspita Fadly, Sp.JP, Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, MM dan

pejabat terkait lainnya. Sekdako Sonny menyampaikan, verifikasi dan validasi terhadap data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Anak Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dengan angka stunting 15,57% diperlukan. Begitu juga dengan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), menetapkan angka stunting 20%. "Untuk membedakan

mana yang betul-betul stunting dan tidak stunting, diperlukan pendataan verifikasi dan validasi. Dalam penanganan stunting harus tepat sasaran, tepat program, dan tepat anggaran. Kami berharap seluruh tim yang tegabung bekerja ekstra. Koordinasi berjalan dengan baik," katanya. Dikatakannya lagi, dari data tersebut dilaku-

kan pemetaan, langkah-langkah pencegahan sebelum terjadi maupun penanganan bila sudah terjadi. Sementara itu, Dokter Dian mengatakan, pencegahan stunting merupakan hal yang sangat penting. "Di sinilah tugas BKK-BN bersama Generasi Berencana (GenRe). Anak-anak GenRe, anak-anak

PIK-R menjadi wadah informasi pada teman-temannya. Karena salah satu penyebab stunting adalah pengetahuan ibu yang kurang. Kedua, anak menikah dini. Ketiga, jarak anak terlalu dekat, berimbas terhadap konsumsi gizi ibu dan anak. Kemudian, memberikan penyuluhan penguatan pemantauan pada 1.000 HPK (Hari Per-

tama Kehidupan)," tuturnya. Dokter Spesialis Anak, dr. Yunira Yunirman, Sp.A menuturkan, yang diprihatinkan dari stunting bukan hanya sekadar mengejar tinggi bada, tetapi perkembangan kognitif anak. "Yang nanti menjadi beban keluarga. Kalau tinggi mungkin bisa bertambah," ujarnya. (rmd)



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Posmetro Padang

Wako Fadly Amran bakal Terima Anugerah FASI XI

PADANG PANJANG, METRO

Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano bakal menerima Anugerah FASI XI Tahun 2022 yang akan diserahkan pada acara pembukaan Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) XI Tingkat Nasional pada 25 Maret 2022 di Jakabaring Sport City (JSC), Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Hal tersebut disampaikan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako, Erwina Agreni, M.Si kepada POSMETRO, Selasa (22/3).

"Berdasarkan hasil kajian dari Tim Penerimaan Anugerah FASI DPP BKPRMI, Wako Fadly dinyatakan layak untuk mendapatkan anugerah tersebut," katanya.

Dalam bidang keagamaan, kata Reni, Wako Fadly men-

canangkan program prioritas "Gelora Serambi Mekkah" yang diisi dengan sejumlah kegiatan.

Antara lain Pejuang Subuh/Subuh Mubarakah, Smart Surau dan Kampung Tahfidz.

Selain itu Wako Fadly dinilai sebagai sosok yang membangun sinergi dengan berbagai lembaga keagamaan yang ada di Kota Padang Panjang, termasuk BKPRMI.

"BKPRMI juga menilai Wako Fadly sebagai pemimpin yang memberikan perhatian besar terhadap

aspek keagamaan, pendidikan dan tatanan sosial kemasyarakatan. Bahkan menjadikannya sebagai salah satu pilar dari empat pilar pembangunan yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023," sebutnya. (rmd)



FADLY AMRAN

Wakili Sumbar, Padang Panjang Kirim 13 Peserta di Festival Anak Shaleh Indonesia

PADANG PANJANG, METRO

Kota Padang Panjang mengirimkan 13 peserta yang masuk dalam 25 santri perwakilan Sumatera Barat pada Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) XI Tingkat Nasional Tahun 2022. Kegiatan ini digelar Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Pusat, 24-27 Maret di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako, Erwina Agreni, M.Si, Selasa (22/3) mengatakan, FASI merupakan pagelaran lomba kreativitas para santri berprestasi. Baik santri Taman Kanak-Kanak Al Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) dan santri Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA).

"Alhamdulillah lebih separuh santri perwakilan Sumbar berasal dari Kota Padang Panjang. Separuhnya ada dari Tanah Darat, Padang dan Pesisir Selatan. Semoga Sumbar bisa menorehkan prestasi. Santri dari Padang Panjang akan kita lepas secara resmi besok," katanya.

Sementara itu, Ketua I BK-

PRMI Padang Panjang, Ustadz Erianto didampingi Direktur Daerah Lembaga Pengembangan Pembinaan Dakwah dan SDM, Ustadz Syafraldi menyampaikan, dari 19 cabang perlombaan dalam festival ini, Padang Panjang ikut 13 cabang.

Adapun lomba yang diikuti di antaranya tingkat TKA mengikuti lomba pada cabang Adzan dan Iqomah, serta Ceramah Agama Islam Bahasa Indonesia. Kemudian tingkat TPA mengikuti lomba Tartil Al Qur'an Adzan dan Iqomah, Nasyid Islami, Cerdas Cermat Al-Qur'an, dan Ceramah Agama Islam Bahasa Indonesia.

Lalu, tingkat TQA ikut pada lomba Tilawah Al Qur'an, Tahfidz Juz'Amma, Cerdas Cermat Al Qur'an, Kisah Islami, Kaligrafi dan Ceramah Agama Islam Bahasa Indonesia. "Sejauh ini persiapan sudah kita optimalkan. Semoga ajang ini bisa membawa harum nama Provinsi Sumbar dan Kota Padang Panjang, serta menjadi amal ibadah karena ini bagian dari syiar Islam," tuturnya. (rmd)



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Rakyat Sumbar



TIM Penilai KPRI Berprestasi ketika mengunjungi KPN Syariah Balaikota.

KPN Syariah Balaikota Wakili Padangpanjang

Guguk Malintang, Rakyat Sumbar—Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Balaikota wakil Kota Padangpanjang untuk penilaian KPRI Berprestasi tahun buku 2021. Pusat Koperasi Pegawai RI (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke KPRI KSPPS Balaikota atau lebih dikenal dengan KPN Syariah Balaikota guna penilaian KPRI Berprestasi Tahun Buku 2021 untuk tingkat Sumbar.

Tim Penilai yang terdiri atas Yasdi, S.P selaku Sekretaris PKP-RI Sumbar dan Fauzen Yazid, SH (bendahara) disambut di Balaikota oleh Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si selaku Ketua Perwakilan PKP-RI Kota Padang Panjang, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Jevie Charter Eka Putra, MT dan Kabag Perencanaan dan SDA Setdako selaku Sekretaris Perwakilan PKP-RI Kota Padangpanjang, Putra Dewangga, S.S, M.Si.

Dalam penyambutannya, Sekdako Sonny mengapresiasi pembinaan yang dilakukan oleh PKP-RI terhadap KPRI-KPRI yang ada di Kota Padangpanjang. KPRI diharapkan dapat menjadi percontohan bagi perkembangan perkoprasian di Kota Padangpanjang.

"Kami mengupayakan agar seluruh KPRI bisa tergabung dalam PKP-RI. Anggota non-aktif, bisa aktif kembali. Apalagi Kota Padang Panjang sudah dikenal sebagai Kota Koperasi Syariah di Sumatera Barat bahkan di Indonesia," sebut Sonny.

Sedangkan Jevie Charter menyampaikan harapan agar PKP-RI juga dapat membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada di Kota Padangpanjang untuk tidak hanya mengandalkan usaha simpan pinjam, tetapi juga mulai mengembangkan usaha ke sektor riil. Sehingga dapat lebih menggerakkan roda perekonomian di Kota Padang Panjang.

Sementara Ketua KPN Syariah Balaikota, Dr. Winarno, M.E, didampingi Ketua Dewan Pengawas, Syahdanur, SH, dalam paparannya di depan Tim Penilai menyampaikan, KPN Syariah Balaikota Padang Panjang dibentuk sejak 31 Oktober 1969. Sejak 21 Juni 2021, bertransformasi menjadi koperasi berpola syariah dengan nama KPN Syariah Balaikota Padangpanjang.

"Sejak tahun 2018, kinerja KPN terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah anggota yang terus bertambah setiap tahun dan keuntungan yang juga mengalami peningkatan. SHU tahun 2021 Rp 1,4 M, naik hampir 100% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah Rp 0,71 M. Selain diperoleh dari usaha simpan pinjam berpola syariah, KPN juga memiliki unit usaha toko yang menjadi penyokong bertambahnya keuntungan koperasi tersebut," paparnya.

Selain itu, tambahnya, dari sisi biaya pun, dapat ditekan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Sementara Putra Dewangga menyampaikan, dengan kinerja yang bagus tersebut, menjadi pilihan Perwakilan PKP-RI Kota Padang Panjang untuk mengusulkan KPN mengikuti penilaian ini.

Terhadap pemaparan itu, Yasdi menyatakan kekagumannya pada kinerja KPN Syariah Balaikota. Baik dari sisi administrasi maupun keuangan.

"Tidak banyak KPRI yang bisa berkembang seperti KPN ini. Namun demikian, hasil penilaian terhadap akan dibandingkan dengan KPRI dari 16 kabupaten dan kota lainnya yang juga dinilai PKP-RI. Mudah-mudahan saja KPN bisa menjadi yang terbaik," imbuhnya.

Hasil penilaian, katanya, akan diumumkan pada acara RAT PKP-RI Sumbar pada 28 Mei mendatang," tutupnya. (ned)

KPID Sumbar Sosialisasikan Peralihan TV Analog ke Digital

Guguk Malintang, Rakyat Sumbar—Menyongsong ASO (analog switch off) yang akan efektif berlaku per 30 April untuk Kota Padang Panjang, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat mengunjungi Kominfo, Selasa (22/3).

Rombongan yang terdiri dari Andres, S.E, M.Si sebagai Koordinator Bidang PS2P dan Novriardi, Muhammad Syarif, S.Pd dari Sekretariat KPID diterima Kepala Dinas Kominfo, Drs. Ampera Salim, S.H, M.Si, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Maryulis Max, S. Sos, M.I. Kom dan Pranata Humas Ahli Muda, Yuliaty Desi Putri, S.Pt.

Andres menyebutkan, kunjungan ini dalam rangka monitoring, evaluasi dan sosialisasi ASO. Dikatakannya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, pada Pasal 72 Angka



TIM KPID Sumbar ketika mengunjungi Kominfo Kota Padangpanjang.

8 menyatakan bahwa migrasi penyiaran teresterial teknologi analog ke digital harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak diundangkan. Dengan begitu, maka migrasi TV analog ke digital itu paling lambat terjadi pada 2 Novem-

ber 2022.

"Kota Padangpanjang masuk sebagai daerah yang masuk zona Sumbar 1. Dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, ada lima daerah yang tidak terdampak ASO ini. Yaitu Kabupaten Pasaman,

Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai," ungkap Andres.

Untuk beralih ke TV digital, sebutnya, ada satu langkah mudah yang bisa masyarakat lakukan. Yaitu melakukan pengecekan televisi di rumah

masing-masing. Kalau TV di rumah sudah Smart TV, cukup lakukan scanning ulang saja, maka otomatis siaran digital sudah bisa dinikmati. Bila pesawat televisi masih analog, perlu tambahan Set Top Box (STB).

"Dengan STB tersebut, masyarakat dapat menikmati tontonan yang bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya," katanya. Sementara itu, Ampera Salim menyebutkan, pihaknya akan mendukung upaya sosialisasi yang dilakukan KPID ini. Namun, sampai saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resminya dari pihak terkait.

"Sejauh ini kami baru mendengar kabar-kabar saja. langkah-langkah mewujudkan proses peralihan ke TV digital tersebut kami belum menerima infonya lebih lanjut," ungkapnya. (ned)



KLIPING BERITA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Harian Khazanah

KPN Syariah Balai Kota Ikuti Penilaian KPRI Sumbar Berprestasi

Padang Panjang, **Khazanah**—KPN Syariah Balai Kota wakil Kota Padang Panjang untuk penilaian KPRI Berprestasi tahun buku 2021. Pusat Koperasi Pegawai RI (PKP-RI) Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke KPRI KSPPS Balai Kota atau lebih dikenal dengan KPN Syariah Balai Kota guna penilaian KPRI Berprestasi Tahun Buku 2021 untuk tingkat Sumbar.

Tim Penilai yang terdiri atas Yasdi, S.P selaku Sekretaris PKP-RI Sumbar dan Fauzen Yazid, SH (bendahara) disambut di Balai Kota oleh Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si selaku Ketua Perwakilan PKP-RI Kota Padang Panjang, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Jevie Charter Eka Putra, MT dan Kabag Perekonomian dan SDA Setdako selaku Sekretaris Perwakilan PKP-RI Kota Padang Panjang, Putra Dewangga, S.S, M.Si.

Sekdako Sonny mengapresiasi pembinaan yang dilakukan oleh PKP-RI terhadap KPRI-KPRI yang ada di Kota Padang Panjang. KPRI diharapkan dapat menjadi percontohan bagi perkembangan perkoperasian di Kota Padang Panjang.

"Kami mengupayakan agar seluruh KPRI bisa tergabung dalam PKP-RI. Anggota non-aktif, bisa aktif kembali. Apalagi Kota Padang Panjang sudah dikenal sebagai Kota Koperasi Syariah di Sumatera Barat bahkan di Indonesia," sebut Sonny.

Sedangkan Jevie Charter menyampaikan harapan agar PKP-RI juga dapat membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada di Kota Padang Panjang untuk tidak hanya mengandalkan usaha simpan pinjam, tetapi juga mulai mengembangkan usaha ke sektor riil. Sehingga dapat lebih menggerakkan roda perekonomian di Kota Padang Panjang.

Sementara Ketua KPN Syariah

Balai Kota, Dr. Winarno, M.E, didampingi Ketua Dewan Pengawas, Syahdanur, SH, dalam paparannya di depan Tim Penilai menyampaikan, KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang dibentuk sejak 31 Oktober 1969. Sejak 21 Juni 2021, bertransformasi menjadi koperasi berpola syariah dengan nama KPN Syariah Balai Kota Padang Panjang.

"Sejak tahun 2018, kinerja KPN terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah anggota yang terus bertambah setiap tahun dan keuntungan yang juga mengalami peningkatan. SHU tahun 2021 Rp 1,4 M, naik hampir 100% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah Rp 0,71 M. Selain diperoleh dari usaha simpan pinjam berpola syariah, KPN juga memiliki unit usaha toko yang menjadi penyokong bertambahnya keuntungan koperasi tersebut," paparnya.

Selain itu, tambahnya, dari sisi

biaya pun, dapat ditekan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Sementara Putra Dewangga menyampaikan, dengan kinerja yang bagus tersebut, menjadi pilihan Perwakilan PKP-RI Kota Padang Panjang untuk mengusulkan KPN mengikuti penilaian ini.

Terhadap pemaparan itu, Yasdi menyatakan kekagumannya pada kinerja KPN Syariah Balai Kota. Baik dari sisi administrasi maupun keuangan.

"Tidak banyak KPRI yang bisa berkembang seperti KPN ini. Namun demikian, hasil penilaian terhadap akan dibandingkan dengan KPRI dari 16 kabupaten dan kota lainnya yang juga dinilai KP-RI. Mudah-mudahan saja KPN bisa menjadi yang terbaik," imbulnya.

Hasil penilaian, katanya, akan diumumkan pada acara RAT PKP-RI Sumbar pada 28 Mei mendatang," tutupnya. ■

paulhendri



KPN - KPN Balai Kota wakil Kota Padang Panjang untuk penilaian KPRI Berprestasi. (ist)

Percepatan Penurunan Stunting di Padang Panjang



Padang Panjang, **Khazanah**—Pemko Padang Panjang menyiapkan sejumlah langkah percepatan penurunan stunting. Ini sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekdako Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Senin (21/3) lalu, di Aula Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA). Rapat juga dihadiri Ketua TP-PKK, dr. Dian Puspita Fadly, Sp.JP, Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, MM dan pejabat terkait lainnya.

Sekdako Padang Panjang,

Sonny Budaya menyampaikan, verifikasi dan validasi terhadap data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Anak Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dengan angka stunting 15,57% diperlukan. Begitu juga dengan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), menetapkan angka stunting 20%.

"Untuk membedakan mana yang betul-betul stunting dan tidak stunting, diperlukan pendataan verifikasi dan validasi. Dalam penanganan stunting harus tepat sasaran, tepat program, dan tepat anggaran. Kami berharap seluruh tim yang tegabung bekerja ekstra. Koordinasi berjalan dengan baik," katanya.

Dikatakannya lagi, dari data tersebut dilakukan pemetaan, langkah-langkah pencegahan sebelum terjadi maupun penanganan bila sudah terjadi.

Sementara itu, Dokter Dian Puspita mengatakan, pencegahan

stunting merupakan hal yang sangat penting.

"Di sinilah tugas BKKBN bersama Generasi Berencana (GenRe). Anak-anak GenRe, anak-anak PIK-R menjadi wadah informasi pada teman-temannya. Karena salah satu penyebab stunting adalah pengetahuan ibu yang kurang. Kedua, anak menikah dini. Ketiga, jarak anak terlalu dekat, berimbas terhadap konsumsi gizi ibu dan anak. Kemudian, memberikan penyuluhan penguatan pemantauan pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan)," tuturnya.

Sementara itu, Dokter Spesialis Anak, dr. Yunira Yunirman, Sp.A menuturkan, yang diprihatinkan dari stunting bukan hanya sekadar mengejar tinggi bada, tetapi perkembangan kognitif anak.

"Yang nanti menjadi beban keluarga. Kalau tinggi mungkin bisa bertambah," ujarnya ■ Paulhendri.



Nama Media : Harian Khazanah

Tingkatkan Pelayanan di Padang Panjang, Ombudsman Lakukan Pendampingan



KEPALA - Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman, Mellisa Fitri Harahap, SH, M.Kn.

Padang Panjang, Khazanah—Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Ombudsman melakukan pendampingan di Kota Padang Panjang, Selasa (22/3). Kegiatan ini dalam rangka evaluasi dan pembinaan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Ada empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi lokus atau objek penilaian pada tahun 2021 oleh Ombudsman. Yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Dari keempat OPD ini, ada 69 produk yang telah dinilai dengan persentase 69,87 persen.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman, Mellisa Fitri Harahap, SH, M.Kn menyampaikan, untuk Padang Panjang pelayanan sudah bagus. Namun masih kurang dalam penerapan pelayanan publik. Standar pelayanan publik ini merupakan kewajiban bagi setiap

daerah. Mulai dari membuat, menyusun dan mengimplementasikan.

"Khusus hari ini, saya menerangkan lebih ke implementasi pelayanan melalui website resmi yang ada di OPD masing-masing. Dengan tujuan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik," sebutnya.

Indikator penilaian yang disediakan Ombudsman ada sembilan. Di antaranya standar pelayanan di mana persyaratannya ada biaya, jangka waktu, produk layanan dan alur pelayanan.

"Satu saja tidak ada, maka akan kurang nilainya. Kedua, maklumat layanan yang berisi janji penyelenggara. Ketiga, sarana dan prasarana harus lengkap fasilitasnya, mulai meja layanan, ruang tunggu dan toilet. Keempat pelayanan khusus, adanya kebutuhan ibu hamil, lansia dan yang berkebutuhan khusus," jelasnya.

Untuk yang kelima, lanjutnya,

pengelolaan pengaduan harus ada ketersediaan sarana pengaduan, pelaksana pengaduan dan alur pengaduan. Yang keenam, penilaian kinerja berisikan instrumen pengumpul data terkait kepuasan pengguna layanan. Ketujuh visi, misi dan moto pelayanan. Delapan atribut dan terakhir pelayanan terpadu.

"Semua ini harus ada dan lengkap untuk bisa mendapatkan nilai terbaik," sebutnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si menyampaikan, Aparatur Sipil Negara tugasnya adalah melayani masyarakat. "Jadi kita di Pemko adalah pelayan untuk masyarakat. Layanan mulai dari kebutuhan administrasi masyarakat, harus kita penuhi," sebutnya.

Sonny menyebutkan, penilaian Ombudsman untuk Padang Panjang masih dalam rentang nilai sedang, perlu dievaluasi bagian mana yang masih kurang dan mana yang harus diperbaiki.

Dari empat OPD yang dinilai, dua sudah memiliki nilai tinggi yaitu Disdukcapil dan DPMPTSP. Dua OPD lagi masih kurang, Dinkes dan Disdikbud.

"Ini tolong menjadi catatan apa yang harus dilengkapi segera dilengkapi. Kita jangan sampai setengah-setengah dalam melakukan pelayanan ke masyarakat. Mari tingkatkan lagi," kata Sonny.

Ia berharap ini menjadi evaluasi. Apa kekurangan yang mesti tidak terjadi, seperti laporan yang belum disampaikan dan data yang harus diinput, harus diinput segera.

"Saya minta setelah ini, semua OPD agar menyiapkan semua indikator standar penilaian yang diminta Ombudsman. Ini bukan masalah nilai saja, namun lebih ke peningkatan pelayanan kita ke masyarakat," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut kepala OPD, camat dan lurah se-Padang Panjang. ■ paulhendri



Nama Media : Mingguan Bidik Indonesia

Wako Fadly Amran Padang Panjang Diuntungkan VBWS 2023

Liputan : Ronaldo Bahri, SE (Wartawan BIN Padang Panjang-Tanah Datar/Sumbar)

Padang Panjang - Wako Fadly Amran ingin Padang Panjang diuntungkan dengan adanya program Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) pada 2023 yang di-canangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

"Saya ingin Padang Pan-

jang salah satu yang betul-betul nikmatinya. Jangan sampai kita kalah gerak. Saya ingin Padang Panjang menjadi daerah yang diuntungkan," kata Wako Fadly pada acara High Level Meeting Tim Pengendalian Infalasi Daerah (TPID), di Aula Lantai III Balai Kota, Rabu.

Menurutnya, spot wisata harus dipilih mana yang layak untuk VBWS 2023 itu. Sehingga ketika membuat kalender event, lebih jelas.

"Mana yang menjadi peluang-peluang untuk bisa merepresentasikan kita kepada pelancong yang ditargetkan," ujarnya.

Wisata religi dengan tujuan masjid terindah, ujar wako, Masjid Islamic Center harus masuk.

"Begitupun paket wisata kuliner, harus masuk Pasar Kuliner. Kalau desa wisata, Kubu Gadang, Lalu, kalau masjid tua, Masjid Asasi," ucapnya.

PLN Beri Apresiasi Ke Pemkot Padang Panjang Karena Bayar Tagihan PJU Tepat Waktu

Liputan : Ronaldo Bahri, SE (Wartawan BIN Padang Panjang-Tanah Datar/Sumbar)

Padang Panjang - Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menerima apresiasi dari Manajer Unit Layanan Pelanggan (ULP) PT PLN Persero Kota Padang Panjang, Dedi Yudison Kardoni, karena membayar tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) tepat waktu.

Apresiasi tersebut berupa plakat dan piagam yang diterima Wako Fadly didampingi Kepala Dinas Perhubungan

(Dishub) Arkes Refagus, diserahkan pada 16 Maret 2022.

Dedi menyampaikan, apresiasi ini diberikan karena Pemkot Padang Panjang selalu tepat waktu dalam pembayaran tagihan PJU.

"Sampai saat ini Pemkot tidak pernah telat dalam hal pembayaran tagihan PJU. Semoga ke depan kerja sama kita semakin erat dan semakin maju," katanya.

Wako Fadly mengucapkan

terima kasih kepada PLN yang telah memberikan apresiasi ini. "Ini akan menjadi motivasi bagi Pemkot ke depannya. Saya berterima kasih kepada Dishub yang selalu ingat dan tepat waktu dalam membayar tagihan PJU," ucapnya.

Sementara itu, Arkes Refagus mengucapkan terima kasih kepada PLN dan insyaa Allah ke depan ini akan dipertahankan.



Nama Media : Mingguan Bidik Kasus

Wako Fadly Amran Dukung Penuh Pagelaran Temu Penyair Se-Asia Tenggara II

Liputan : Syahril. B (Wartawan BIKAS Padang Panjang / Sumbar)



Padang Panjang - Walikota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduak Malano dukung penuh pagelaran Temu Penyair se-Asia Tenggara II di Kota Padang Panjang. Hal ini diutarakannya saat

rapat teknis bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) dan panitia, Jumat (18/3) malam, di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam rapat tersebut, Fadly juga meminta agar semua persiapan bisa dilaku-

kan dengan baik. Mulai dari kepanitiaan, tempat pelaksanaan, penginapan untuk para penyair yang nantinya akan datang ke Kota Padang Panjang. "Kita berharap ini terlaksana dengan persiapan yang matang. Untuk saat ini, saya melihat persiapan udah oke dan kita tunggu tanggal mainnya. Semoga pada Temu Penyair II ini, banyak menarik penyair mancanegara dan Indonesia untuk datang ke Padang Panjang," ucapnya.

Fadly juga berharap, event ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena untuk penginapan akan direncanakan memakai fasilitas

rumah-rumah warga. Kegiatannya pun akan dilaksanakan di desa-desa wisata yang ada di Padang Panjang.

Kepala DPK, Yan Kas Bari, SE mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan persiapan untuk terlaksananya kegiatan ini. Dalam waktu dekat akan dilakukan rapat teknis bersama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dan Dinas Pendidikan yang akan dipimpin langsung oleh wali kota. "Dengan suksesnya kegiatan ini, menjadi salah satu pendukung bahwasannya kita kota literasi," sebutnya.

Minyak Goreng Curah Disubsidi, Minyak Goreng Kemasan Sesuai Harga Pasar

Liputan : Syahril. B (Wartawan BIKAS Padang Panjang / Sumbar)

Padang Panjang - Di tengah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan High Level Meeting (HLM) pada Rabu (16/3) lalu, tak lama berselang Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Relaksasi Penetapan Harga Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dan Kemasan Premium.

Kabag Perencanaan dan Sumberdaya Alam Setdako selaku Ketua Tim Teknis TPID Kota Padang Panjang, Putra Dewangga, S.S, M.Si kepada Kominfo, Jumat (18/3) menye-

butkan, substansi utama dari SE ini adalah bahwa terhitung 16 Maret 2022, Pemerintah akan memberikan subsidi pada minyak sawit curah di pasar-pasar rakyat. Sedangkan harga minyak goreng sawit kemasan, dilepas ke harga keekonomian (harga pasar).

"Tujuan kebijakan ini pada dasarnya adalah untuk menghindari permainan spekulasi dan mafia minyak. Serta menjaga ketersediaan minyak goreng sawit di pasar-pasar yang ada," ulasnya.

Pemerintah Kota, kata Putra, memahami bahwa pe-

rubahan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada perekonomian Kota Padang Panjang. Karena minyak goreng termasuk salah satu kebutuhan penting rumah tangga dan banyak UMKM yang menggunakan minyak goreng untuk usaha kuliner yang mereka geluti.

Untuk itu, imbaunya, kepada warga diminta untuk bisa memahami dan menyikapi kebijakan ini secara bijak. Pemerintah Kota melalui TPID akan senantiasa melakukan pemantauan di lapangan. "Di samping itu, TPID juga akan berkoordinasi dengan Pemer-

intah Provinsi dan Pusat untuk mendapatkan solusi terbaik bagi masyarakat Kota Padang Panjang," ucapnya.

Dijelaskannya juga, saat pelaksanaan HLM dirumuskan strategi mengatasi ketersediaan dan harga minyak goreng sawit kemasan di Kota Padang Panjang. Saat itu, masih terdapat minyak goreng sawit kemasan dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Namun tak lama setelah HLM selesai, barulah terbit SE Mendag.



Nama Media : Mingguan Bidik Kasus

LKPD Kota Padang Panjang Terbaik Di Sumbar

Liputan : Syahril. B (Wartawan BIKAS Padang Panjang / Sumbar)

Penyerahan LKPD Tahun 2021 kepada BPK Sumbar
dari Pemda di Sumatera Barat



Padang - Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang tahun 2021 menjadi laporan terbaik se-Provinsi Sumatera Barat. LKPD tersebut diserahkan

Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar, Yusnadewi, S.E, M.Si, Ak di Kantor Per-

wakilan BPK, Jalan Khatib Sulaiman Padang, Jumat (18/3).

Dikatakan Yusna Dewi, Padang Panjang menjadi yang terbaik dalam pelaporan LKPD tahun ini, dengan persentase 79% dari target maksimal 85%. Ia memberikan apresiasi kepada Kota Padang Panjang yang telah menyelesaikan dan menyerahkan LKPD lebih cepat dari waktu yang ditentukan. "Ini membuktikan sistem yang berjalan cukup baik, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang cepat bisa disampaikan kepada BPK," ungkap Yusna.

Setelah penyerahan LKPD ini, lanjut Yusna, BPK akan menindaklanjuti dengan pe-

meriksaan bersama Kantor Akuntan Publik (KAP).

Saat penyerahan LKPD tersebut, Fadly Amran juga turut didampingi Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Inspektur, Dr. Syahril, M.H dan Kepala BPKD, Dr. Winamo, M.E.

Wako Fadly mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana implementasinya dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, setiap daerah wajib melaporkan LKPD maksimal dalam waktu tiga bulan anggaran berjalan.



Nama Media : Mingguan Rakyat Sumbar

37 Mustahik Terima Zakat dari Berbagai Program Baznas

PADANG PANJANG (RS) — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang Panjang kembali menyalurkan zakat untuk berbagai program, Jumat (18/3). Sebanyak 37 mustahik menerima zakat yang merupakan program Padang Panjang Cerdas, Padang Panjang Sehat, Padang Panjang Makmur dan Padang Panjang Peduli.

“Totalnya, hari ini kita telah salurkan Rp 68.775.000 untuk 37 orang mustahik yang berhak menerima zakat dengan nominal yang berbeda-beda,” ungkap Sekretaris Baznas, Drs. Rafles Sama.

Dijelaskannya, untuk program Padang Panjang Cerdas sebanyak Rp 57.125.000 telah disalurkan untuk 29 mustahik. Kemudian program Padang Panjang Makmur satu mustahik, program Padang Panjang Sehat untuk tiga mustahik dan program Padang Panjang Peduli untuk empat mustahik.



Kepada mustahik, Rafles menekankan agar menghindari urusan dengan rentenir. “Baik itu kesehatan, pendidikan, modal usaha dan persoalan rumah tangga lainnya. Ketika ada persoalan seperti itu, silahkan datang

Baznas. Sampaikan persoalannya di sini. Insyaa Allah, kami akan carikan solusinya,” tuturnya.

Ditambahkannya, melalui penyaluran program Padang Panjang Cerdas, pihaknya berharap, anak penerima

zakat program tersebut tidak drop out (DO) atau putus sekolah.

“Kami harap, mustahik penerima program ini menjadi pribadi yang bagus etikanya. Baik itu hubungan ke orang tua maupun hubun-

gan ke Allah SWT,” ujarnya.

Dalam waktu dekat ini, tambahnya, Baznas akan kembali menyalurkan zakat program Padang Panjang Makmur di Kecamatan Padang Panjang Timur. (ben)



Dokter Dian Lakukan Verifikasi Lapangan Enam Kader Posyandu

PADANG PANJANG (RS) — Tim verifikasi lapangan yang diketuai Ketua TP-PKK Kota, dr. Dian Puspita Fadly Amran, Sp.JP melakukan kunjungan lapangan terhadap enam kader posyandu yang terpilih dalam Penilaian Kader Posyandu Terintegrasi Tingkat Kota Padang Panjang tahun 2022, Kamis (17/3).

Enam kader tersebut terdiri dari tiga utusan Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB), di antaranya Kelurahan Bukit Surungan, Silaing Atas dan Kampung Manggis. Tiga dari Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT), yaitu Kelurahan Ganting, Guguk Malintang, dan Koto Panjang.

Dokter Dian dalam kesempatan tersebut menyampaikan, verifikasi lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan data yang telah disampaikan para kader saat melakukan ekspos program kerja yang telah dilakukan di posyandunya masing-masing.

Menurut Dian, ada tiga indikator penilaian dalam tahap ini yang harus dipenuhi masing-masing kader posyandu. Yaitu meliputi indikator input, proses dan output.

Dian menilai pada dasarnya apa yang telah dibuat posyandu sudah sangat bagus. Namun perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi melalui inovasi-inovasi dari

para kader. Dian mengharapkan, lomba kader posyandu ini dari tahun ke tahun ada peningkatan dan pelaksanaan posyandu terintegrasi, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) betul-betul ada progresnya setiap pelaksanaan posyandu.

“Dalam pelaksanaan posyandu perlu didukung oleh inovasi-inovasi dari kader dalam mengelola posyandu tersebut di lapangan. Data dindingnya harus selalu ada, tertib administrasi serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak-anak balita yang dilakukan bervariasi. Sehingga anak-anak ini bersemangat untuk pergi posyandu,” imbuhnya.

Dian juga meminta pedulian dari kecamatan beserta perangkat kelurahan, serta pihak terkait untuk dapat andil dalam mendukung pelaksanaan posyandu ini.

“Semoga lomba ini dapat meningkatkan peran serta posyandu dalam masyarakat. Sehingga para kader bisa menambah pengetahuan dan keterampilan. Serta meningkatkan gizi, kesehatan masyarakat, dan anak-anak yang ada di posyandu,” harap Dian.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut camat dan lurah, serta pengurus PKK yang masuk dalam nominasi enam besar penilaian. (ben)

Tingkatkan Kualitas Guru, Pemko Kerja Sama dengan Guru Binar

PADANG PANJANG (RS) — Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) lakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Guru Binar dalam Program Peningkatan Kualitas Guru Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah melalui Pemanfaatan Pelatihan Guru Darling-Guru Binar, Jumat (18/3).

Bertempat di Ruang Kerja Wali Kota, penandatanganan dilakukan Kepala Disdikbud, Drs. M. Ali Thabrani, M.Pd dengan Senior Director, Elan Merdy disaksikan Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano dan Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si.



Wako Fadly menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas inisiatif Guru Binar dalam meningkatkan kualitas guru yang ada di Kota Padang Panjang. “Kerja sama ini merupakan salah satu upaya nyata

Pemko dalam meningkatkan kualitas guru. Sehingga nantinya lulusan yang dihasilkan akan lebih baik dan menjadi input yang baik pula bagi kelanjutan jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujar Fadly.

Guru Binar merupakan sebuah platform pengembangan karir guru melalui pelatihan dan beragam pengembangan profesionalisme. Selain itu, Guru Binar dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pelatihan guru melalui pelatihan yang terstruktur, terukur, sesuai dengan kebutuhan, yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja secara online (belajar swapacu).

“Kita berharap dengan ditandatanganinya kerja sama ini, mampu memberikan kesempatan kepada guru-guru di Kota Padang Panjang untuk mendapatkan akses pelatihan berkualitas demi meningkatkan kompetensi

dan lulusan Kota Padang Panjang yang cemerlang,” ungkap Fadly lagi.

Head of Guru Binar, Juliana menyebutkan, terdapat kuota sebanyak 200 orang yang akan mengikuti Guru Binar ini. Guru-guru tersebut akan dipilih dan diseleksi Disdikbud, yang layak dan benar-benar ingin belajar dari Guru Binar ini. Pelatihan selama 32 jam pelajaran atau sekitar tiga minggu.

“Dari 200 guru yang terpilih, nantinya kami akan memilih The Champion. Sehingga mereka juga bisa membagikan pengalaman yang mereka dapatkan dengan mengikuti Guru Binar kita ini kepada guru lainnya,” tuturnya. (ben)



Nama Media : Mingguan Sumbar Post

Sebanyak 40 Pelaku Usaha Mikro Kota Padang Panjang Ikuti Pelatihan Kewirausahaan

Padang Panjang - Sebanyak 40 pelaku usaha mikro Kota Padang Panjang ikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM).

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, di Aula Senja Kenangan, Kamis, guna memberikan pemahaman berwirausaha dan membangun jiwa kewirausahaan para pelaku usaha mikro.

Sekdako Sonny berterima kasih dan mengapresiasi Disperdakop UKM yang telah menggagas kegiatan ini untuk membantu pengembangan UMKM di Kota Padang Panjang.

Menurutnya, pengembangan UMKM harus didukung dengan perluasan jaringan pemasaran dan peningkatan kualitas produksi agar memiliki daya saing yang tinggi.

"Sektor UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat Kota Padang Panjang. Untuk itu, kami terus mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat melalui misi pengembangan UMKM, khususnya industri

kecil dan rumah tangga," ujarnya.

Sonny berharap, peserta yang mengikuti pelatihan tersebut bisa mendapatkan pengetahuan yang baik tentang tata kelola kewirausahaan atau ilmu berdagang, dan ilmu produksi.

"Pemkot juga memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM. Untuk senantiasa berupaya mengembangkan usahanya, meningkatkan kualitas produksi di tengah situasi yang penuh tantangan," ucapnya.

Untuk itu, Sonny meminta kepada para peserta agar mengikuti pelatihan ini dengan baik. Sehingga apa yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha selama ini, dapat teratasi.

"Diharapkan saat berjualan nanti, peserta sudah memiliki ilmu dalam berwirausaha. Baik itu dari



strategi pemasaran, peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan kemasan yang bagus. Termasuk, teknik memasarkan produk secara online," harapnya.

Sementara itu, Kabid Koperasi dan UMKM, Rini Lisdayani, S.Sos

selaku ketua pelaksana mengatakan, pelatihan ini berlangsung dua hari hingga 11 Maret mendatang. Narasumber dari akademisi dan nonakademisi. "Peserta khusus UMKM yang ada di Kota Padang Panjang

dengan rata-rata operasional baru dua tahun. Untuk pelatihan ini, penajaman lebih ke SDM-nya. Bagaimana mereka memahami ilmu kewirausahaan. Jangan sampai mereka hanya paham terkait dengan pengolahan produk saja, tapi sampai ke tingkat pemasaran juga harus paham," katanya.

Rini berharap dengan pelatihan ini mereka bisa bikin marketplace, jualan online, dan yang penting keberlangsungan usahanya terjamin. Sehingga mampu bersaing dalam era digitalisasi seperti saat ini.

Kegiatan tersebut turut dihadiri, Kepala Disperdakop UKM, Javie Carter Eka Putra dan Ketua Program Studi Manajemen Program Internasional Universitas Andalas, Berri Brilliant sebagai narasumber. (*//AA)

Bukit Surungan Menjadi Gerai Vaksinasi Pertama untuk Melayani vaksin Booster

Padang Panjang - Kelurahan Bukit Surungan (Busur), Kecamatan

Padang Panjang Barat (PPB) menjadi gerai vaksinasi pertama untuk melayani vaksinasi lanjutan (booster) bagi masyarakat umum.

Gerai vaksinasi booster ini difasilitasi Polres Padang Panjang, Kamis (10/3). Vaksinasi booster sudah bisa didapatkan warga di kelurahan masing-masing dengan jadwal yang ada. Ini akan lebih memudahkan jangkauan warga untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di masing kelurahan.

"Kita dari Polres, akan terus membuka gerai vaksinasi. Kelurahan Busur ini merupakan gerai vaksin booster pertama yang kita sediakan untuk masyarakat. Kita tidak hanya menerima warga

yang akan vaksinasi booster, namun juga yang akan melakukan vaksinasi dosis pertama dan kedua sebagai sarannya," ujar Zamasdi, Kasi Pengawasan Polres Padang Panjang.

Camat PPB, Fiori Agustian, S.IP saat meninjau gerai vaksinasi itu mengatakan, selain di Busur ini, pihaknya juga akan siap jika Polres ingin membuka gerai di kelurahan lain yang ada di PPB.

"Kita serahkan ke lurah masing-masing. Jika mereka siap dan bersedia membuka gerai vaksinasi dan Polres juga membutuhkan, kita siap untuk memfasilitasi itu. Dan kita yakin semua lurah bersedia untuk itu," tutur Fiori.

Saat ditinjau Kominfo, jumlah sementara masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi baik dosis pertama, kedua maupun booster sudah mencapai 43 orang. Ini akan terus bertambah mengingat Polres dan kelurahan membuka gerai hingga habis jam kerja.

"Kami sudah mengimbau warga Busur melalui ketua RT, bagi yang belum vaksinasi untuk mendapatkannya di Kantor Lurah yang sudah difasilitasi Polres," ungkap Lurah Busur, Ryan Afrinaldi.

Bagi warga yang melaksanakan vaksinasi, juga dibekali sembako dari Polres. Selain camat, gerai vaksinasi juga ditinjau lurah se-Kecamatan PPB. (*//AA)





Nama Media : Minggu Indonesia Raya

Wako Fadly Amran Serahkan LKPD Ke BPK Sumbar

Padang Panjang, Indonesia Raya—Wali Kota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Panjang tahun 2021 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Yusnadewi, SE, M.Si, Ak di Kantor Perwakilan BPK, Jalan Khatib Sulaiman Padang, Jumat (18/3).

Saat penyerahan LKPD tersebut, Fadly Amran juga turut didampingi oleh Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Inspektur, Dr. Syahril, M.H dan Kepala BPKD, Dr. Winarno, M.E.

Wako Fadly mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana implementasinya dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, setiap daerah wajib melaporkan LKPD maksimal

dalam waktu 3 bulan anggaran berjalan.

"Alhamdulillah LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2021 sudah selesai dan diserahkan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Kami mengharapkan hasil penilaian LKPD Kota Padang Panjang akan tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" sebut Fadly.

Sementara itu, Yusna Dewi memberikan apresiasi kepada Kota Padang Panjang yang telah menyelesaikan dan menyerahkan LKPD lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

"Ini membuktikan sistem yang berjalan cukup baik. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang cepat bisa disampaikan kepada BPK," ungkap Yusna.

Setelah penyerahan LKPD ini, lanjut Yusna, BPK akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama Kantor Akuntan Publik (KAP).

"Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPD ini dengan KAP," sebutnya.

(Titen)

Cegah Anak Kecanduan Gadget Orang Tua Dibekali Hypnoparenting

Padang Panjang, Indonesia Raya—Kecanduan memainkan handphone atau gadget sudah banyak terjadi pada anak-anak di bawah umur. Ini disebabkan kurangnya batasan orang tua terhadap anak-anak mereka.

Posyandu Mandiri Sehat Ceria bersama TP-PKK Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) gelar hypnoparenting dengan tema Mengatasi Kecanduan Gadget pada Anak, di Aula BBI Ekor Lubuk, Sabtu (19/3).

Dibuka Camat PPT, Drs. Asrul, ia mengatakan kecanduan anak-anak di usia dini terhadap handphone harus dihindari. Pentingnya peran orang tua terhadap hal tersebut. Dengan memberikan batasan-batasan kepada anak untuk bermain gadget.

"Gadget ini tidak selalu hal negatif, namun juga banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Di sini peran orang tua yang sangat kita perlukan. Harus bisa mengarahkan anak-anak jika bermain HP. Kita harus memberikan batasan-batasan kepada mereka," ujar Asrul.

Hypnoparenting ini mendatangkan dua narasumber. Di antaranya Direktur SPECTA Indonesia, Satria Asmal, Sp. CHt, CMh, Ci dan Trainer SPECTA Indonesia, Doni Hendri, Ch, CHt. Para orang tua yang mengikuti hypnoparenting ini mendapatkan pelajaran bagaimana cara terapi anak yang sudah kecanduan gadget.

"Kita berharap dengan adanya hypnoparenting ini, bisa bermanfaat bagi para orang tua. Bisa mengaplikasikannya kepada anak-anak. Sehingga kita bisa menjadikan anak-anak maju dan bermanfaat untuk masyarakat," tutur Asrul. (Titen)

Pemko Tanggung Iuran BPJS TK

Padang Panjang, Indonesia Raya—Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyerahkan secara simbolis kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (10/3), di Ruang Kerjanya. Kartu dibagikan secara simbolis kepada perwakilan perangkat RT, LPM, PSM, TSK, guru TPQ, imam masjid, garin masjid dan mushalla.

Tahun 2022 ini, Pemko Padang Panjang menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan total 1.261 orang. Terdiri dari 714 perangkat Rukun Tetangga (RT), 54 orang dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 94 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Teman Sosial Kita (TSK), 240 guru TPQ, 43 imam masjid, 43 garin masjid dan 73 garin mushalla.

Wako Fadly dalam kesempatan ini menyampaikan, BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat bagi pekerja. Selain mendapatkan perlindungan terhadap risiko kerja yang akan terjadi, BPJS juga memberikan santunan terhadap peserta yang meninggal dunia.

"Kita di Padang Panjang ini, secara bertahap akan terus melaksanakan berbagai upaya mewujudkan Universal Labour Coverage (ULC). Bagaimana kita menjaga pekerja kita aman, pemerintah harus hadir di situ sebagai jaminannya," ucapnya.

Ditambahkannya, Pemko konsen sekali dengan ULC ini. "Kita tidak mau terjadi musibah bagi pekerja. Inilah fungsi kerja sama dengan BPJS ini," ungkapnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Sunjana Achmad menyampaikan apresiasinya atas upaya Pemko Padang Panjang yang telah memberikan perlindungan ketenagakerjaan ini. "Padang Panjang merupakan yang pertama dari kabupaten/kota di Sumatera Barat yang sudah menjalankan ULC. Di mana masyarakat yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ewasoska, SH didampingi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan DPMPTSP, Mardi Suntami mengatakan, upaya ini merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemko terhadap perangkat RT, LPM, guru TPQ, imam, garin atas dedikasinya untuk masyarakat Kota Padang Panjang.

"Tahun 2022 ini, Pemko telah menyiapkan anggaran untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 100.800.000," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, diserahkan juga kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk Wali Kota Fadly, Lalu, Jaminan Kematian (JKM) dan beasiswa untuk ahli waris almarhum Bakri yang merupakan THL di Dinas Perkim LH. (Titen)

Pencegahan Stunting Dimulai Dari Remaja Putri

Padang Panjang, Indonesia Raya—Pencegahan agar anak yang lahir tidak mengalami stunting, dimulai saat beranjak jadi remaja putri. "Dimulai sejak dari remaja putri, dengan mengupayakan agar tidak anemia. Yaitu memberikan tablet tambah darah sekali seminggu dan bila sedang haid, 1 x 1 atau tiap hari selama haid," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Faizah, Jumat (11/3).

Dikatakannya, stunting merupakan keadaan yang dikenal sebagai anak yang pendek dibanding teman seusianya disertai dengan rendahnya tingkat kecerdasan. "Stunting terjadi karena ada gangguan pertumbuhan sejak dalam kandungan. Karena asupan gizi ibu hamil (bumil) yang kurang. Yang menyebabkan bumil anemia atau karena adanya infeksi yang berulang dan kronis pada anak," terangnya.

Ibu hamil, lanjutnya, juga harus dipantau dengan baik. Bila ada tanda-tanda berisiko, bisa segera diintervensi dengan pemberian makanan tambahan. Ditambahkannya, penguatan pemantauan pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sangat penting. Yaitu 270 hari selama janin dalam kandungan, ditambah 730 hari atau sampai anak berumur dua tahun. "Karena masa pertumbuhan dan perkembangan otak akan sangat pesat sampai anak umur dua tahun. Mari kita cegah stunting untuk generasi yang lebih berkualitas," tuturnya. (Titen)



KLIPING BERITA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Media : Minggu Zaman

Padang Panjang akan Manfaatkan Momen VBWS 2023

MENYONGSONG Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023 yang telah digaungkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat Rakor Kepala Daerah se-Sumbar di Kabupaten Mentawai, Pemko akan segera melakukan sejumlah langkah. Momen VBWS 2023 akan dimanfaatkan untuk mengangkat kembali dunia pariwisata Padang Panjang.

"VBWS 2023 ini, saya lihat programnya bagus untuk mendokrak kembali pariwisata Sumatera Barat. Untuk kita di Padang Panjang, saya minta keseriusan seluruh pihak untuk bersiap menghadapinya. Mari kita manfaatkan momen penting ini menjadi panggung Padang Panjang," sebut Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuk Paduko Malano saat memimpin rapat membahas beberapa isu strategis, Jumat (11/3/

22) di Ruang VIP Balai Kota.

Wako Fadly berharap, pariwisata kembali menggeliat di Padang Panjang. "Menjadi kewajiban kita untuk mendorong dan membenahi spot-spot wisata favorit yang ada. Diminta kesiapan seluruh pihak untuk menyiapkan apapun tema yang diangkat nantinya," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Drs. Maiharman kepada Kominfo mengungkapkan sejumlah upaya yang akan dilakukan pihaknya guna persiapan menyongsong VBWS 2023 ini.

Pada tahun 2022 ini, Disporapar akan mempromosikan berbagai objek wisata yang ada seperti objek wisata PDIKM, Masjid Islamic Centre, Desa Wisata Kubu Gadang, Masjid Asasi Sigando,

Serambi Milk Ganting, Lambah Batu Limo Silaing Atas, Lubuk Mato Kuciang, Mifan Waterpark, Gua Batu Batirai, Pasar Kuliner, Stasiun Kereta Api, Panorama Lembah Anai.

"Kita menyusun calendar of event 2022 dan rencana event 2023. Lalu mempromosikan tagline Visit Beautiful West Sumatera Barat 2023 melalui baliho, spanduk, di objek wisata dan event yang akan dilaksanakan," sebutnya.

Di samping itu, tambahnya, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dan mengambil kesepakatan dengan pelaku dunia pariwisata.

"Tak ketinggalan, kita membenahi sarana dan prasarana pada objek-objek wisata yang ada di Padang Panjang," tutur-nya. (edmon)



Di Padang Panjang Harga Pangan Mulai Alami Penurunan

MEMASKI minggu kedua Maret 2022, harga pangan banyak alami penurunan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagaian Perencanaan dan Sumberdaya Alam, Putra Dewangga, S.S, M.Si, Jumat (11/3/22) kemarin.

"Ya benar sekali, perkembangan cukup mengembirakan. Karena cukup banyak harga yang turun. Di antaranya harga minyak goreng dan cabai, sedikit turun. Tapi, harga ikan nila naik cukup signifikan," ujarnya.

Khusus untuk minyak goreng, katanya, akan dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Padang Panjang yang akan digelar minggu depan. Rapat akan dipimpin langsung oleh wali kota selaku ketua TPID Kota Padang Panjang dengan menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama A., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar, Asben Henri, S.E, M.M, Dinas Perdakop UKM Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian, BPS dan seluruh anggota TPID Kota Padang



panjang.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap harga rata-rata 44 komoditas pangan strategis di Pasar Pusat Padang Panjang, katanya, pada minggu kedua ini yang dilakukan Dinas Perdakop UKM dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada beberapa komoditi yang rata-rata turun.

"Di antaranya minyak goreng bermerek dari Rp 16.500/liter menjadi Rp 16.000/liter. Cabai hijau turun dari Rp 37.500/kg menjadi Rp 35.000/kg. Cabai rawit turun dari Rp 35.250/kg menjadi Rp 32.500/kg. Cabai merah turun dari Rp 58.250/kg menjadi Rp 55.000/kg,"

sebutnya.

Selain itu, bawang merah turun dari Rp 34.750/kg menjadi Rp 34.500/kg. Ikan asin teri turun dari Rp 90.000/kg menjadi Rp 89.250/kg. Wortel turun dari Rp 13.000/kg menjadi Rp 12.000/kg. Terong turun dari Rp 8.000/kg menjadi Rp 6.000/kg.

Ditambahkannya, untuk komoditi yang naik di antaranya minyak goreng tanpa merek dari Rp 15.500/kg menjadi Rp 15.750/kg. Daging ayam broiler naik dari Rp 29.750/kg menjadi Rp 30.500/kg. Bawang putih naik dari Rp 28.000/kg menjadi Rp 28.500/kg. Bawang bombai naik dari Rp 24.000/kg menjadi Rp 28.000/kg. Ikan air tawar

(Nila) naik dari Rp 35.000/kg menjadi Rp 40.000/kg.

Dikatakan Putra, dari gambaran di atas, secara umum fluktuasi harga yang terjadi masih dalam batas kewajaran. Mayoritas fluktuasinya berada di bawah 25%. Mayoritas komoditas yang berfluktuasi mengalami penurunan harga di minggu II Maret ini.

"Pergerakan turun pada beberapa komoditas dapat terjadi karena pasokan komoditas di pasar yang melebihi permintaan, sehingga komoditas mengalami penurunan harga. Dan sebaliknya, pada komoditas yang mengalami kenaikan harga, disebabkan berkurangnya pasokan stok komoditas di pasaran," terangnya.

"Pada minggu ini terdapat satu komoditas yang mengalami penurunan di atas 20%, yaitu terong sebesar 25% dari Rp 8.000/kg menjadi Rp 6.000/kg. Selain itu, terdapat dua komoditas yang mengalami fluktuasi antara 10%-20%, yaitu bawang bombai dan ikan nila," tambahnya.

Kenaikan dan penurunan harga, tambahnya lagi, masih terkendali dan tidak mempengaruhi daya beli masyarakat luas secara signifikan. (edmon)

Gerakan Jumat Berkah, Satlantas Polres Bagikan Sarapan Gratis



MELALUI gerakan Jumat Berkah, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Panjang berbagi sarapan pagi secara gratis kepada pengendara kendaraan roda dua dan roda empat serta warga yang melintas di jalan raya, Jumat (11/3/22). Aksi sosial ini digelar di beberapa persimpangan jalan dan lokasi lainnya.

"Semoga kegiatan ini bisa membawa kebaikan bagi kita bersama. Juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan dan menjaga etika dalam berlalu lintas. Serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku saat ini," ujar Kasal Lintas, Iptu. Aldy Lazzuardy, STK, SIK.

Gerakan turun ke jalan ini, lanjutnya, bertujuan untuk mengetuk hati pengendara agar dapat menjadikan hari Jumat tidak hanya sekadar berkewajiban Shalat Jumat saja, namun juga memberikan manfaat kepada sesama.

"Selain untuk berbagi, kegiatan ini sekaligus juga bertujuan untuk memberikan imbauan dalam rangka Operasi Keselamatan Singgalang 2022 kepada masyarakat pengguna jalan. Untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, tetap mematuhi prokes, dan tak lupa mengutamakan keselamatan daripada kecepatan saat berkendara," lanjutnya.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres, AKBP. Novianto Taryono, S.H, SIK, M.H. beserta jajaran personel Satlantas. (edmon)

KLIPING BERITA



Kominfo Padang Panjang



Jalan Prof. M. Yamin Nomor 2



diskominfo.padangpanjang@gmail.com